AR RUMMAN - Journal of Education and Learning Evaluation
E-ISSN: 3047-0943 P-ISSN: 3047-1141
Vol. 1 No. 2 Desember 2024

Pemahaman Pancasila sebagai Sistem Etika dan Hubungannya dengan Korupsi: Studi Kasus Mahasiswa Universitas Negeri Medan

Dheany Angelina Putri Sembiring[1] Steven Ezer Kase[2] Nazwa Shafira[3] Jeremia Sitepu[4] Joy Siburian[5]
Program Studi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia[1,2,3,4,5]
Email: angelinadheany@gmail.com[1] ebenlase14@gmail.com[2] nazwa7700@gmai.com[3] jeremiasitepu43@gmail.com[4] joy@gmail.com[5]

Abstrak
Penelitian ini mengkaji pemahaman mahasiswa Universitas Negeri Medan tentang Pancasila sebagai sistem etika dan relevansinya dengan isu korupsi di Indonesia. Melalui survei terhadap 70 mahasiswa, studi ini mengungkap persepsi mereka tentang nilai-nilai Pancasila, etika anti-korupsi, dan peran Pancasila dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. Hasil menunjukkan pemahaman yang kuat tentang Pancasila sebagai landasan etika (98% setuju) dan hubungannya yang berlawanan dengan praktik korupsi (94,3% setuju atau cukup setuju). Mayoritas responden juga meyakini peran Pancasila dalam mencegah korupsi dan menciptakan pemerintahan yang berintegritas. Studi ini menyoroti pentingnya pendidikan Pancasila dalam membentuk etika anti-korupsi di kalangan generasi muda.
Kata Kunci: Pancasila, Sistem, Etika

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya sekadar simbol, tetapi juga merupakan sistem filsafat yang memberikan pandangan hidup dan etika bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, seharusnya menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan. Namun, maraknya kasus korupsi di berbagai level, termasuk di kalangan mahasiswa, menunjukkan adanya disonansi antara nilai-nilai luhur Pancasila dengan realitas sosial. Perguruan tinggi memegang peranan penting dalam mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi situasi yang rumit dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Mahasiswa merupakan generasi penerus yang akan berhadapan dengan kemajuan masyarakat yang saat ini sedang pesat menjadi generasi penerus bangsa. Agar mampu menghadapi tantangan perubahan yang ada, mahasiswa harus mampu menghadapi berbagai perubahan dan permasalahan yang ditimbulkan oleh perubahan itu sendiri (Prambudi & Najicha, 2023). Dengan demikian, mereka dijuluki sebagai agent of change atau agen perubahan dan pelopor dalam mewujudkan cita-cita bangsa (Utami & Najicha, 2022). Namun, fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit mahasiswa yang terlibat dalam tindakan korupsi. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman mahasiswa Universitas Negeri Medan tentang Pancasila sebagai sistem etika dan hubungannya dengan isu korupsi. Melalui survei yang komprehensif, studi ini berupaya mengungkap persepsi mahasiswa tentang nilai-nilai Pancasila, etika anti-korupsi, dan peran Pancasila dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan karakter dan pencegahan korupsi, serta memberikan rekomendasi bagi perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya membangun generasi muda yang berintegritas dan anti-korupsi.

Kajian Pustaka

Pancasila

Pancasila berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua bagian, yaitu “panca” dan “sila”. Panca berarti lima, dan sila mengandung arti asas, prinsip, aturan tingkah laku, dasar, atau norma perilaku yang baik dan benar. Oleh karena itu, kelima asas yang menjadi pedoman perilaku dan tindakan tersebut dikenal dengan sebutan Pancasila (Nugraheni et al., 2023).

Sistem

Sistem adalah kumpulan bagian atau komponen yang saling berhubungan yang memungkinkan informasi, materi, atau energi mengalir lebih mudah untuk mencapai suatu tujuan (Nugraheni et al., 2023). Maka sistem Pancasila merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Menurut (Prambudi & Najicha, 2023) nilai yang dimaksud yaitu:

1. Pertama, Nilai ketuhanan. Nilai ini dapat dikatakan sebagai nilai tertinggi secara hierarki. Nilai ini adalah sumber dari semua nilai tentang kebaikan. Jika suatu tindakan tidak bertentangan dengan prinsip, hukum, dan nilai-nilai Tuhan, maka tindakan itu dianggap baik. Pendapat ini didukung oleh bukti nyata, yang menunjukkan bahwa tindakan apa pun yang melanggar prinsip, hukum, dan nilai-nilai Tuhan, akan mengarah pada permusuhan dan konflik. Nilai spiritualitas, ketaatan, dan toleransi bersumber dari naik ketuhanan.
2. Kedua, Nilai Kemanusiaan. Keadilan dan peradaban merupakan inti dari nilai-nilai kemanusiaan Pancasila. Keadilan mensyaratkan adanya keseimbangan antara individu dan masyarakat, antara rohani dan jasmani, antara makhluk bebas dan makhluk ciptaan Tuhan yang tunduk pada aturan-aturan Tuhan. Kelebihan manusia atas makhluk lain, baik tumbuhan, hewan, maupun benda mati, ditunjukkan oleh peradaban. Oleh karena itu, jika suatu kegiatan sesuai dengan standar kemanusiaan yang beradab, maka kegiatan tersebut dianggap baik. Nilai-nilai moral, seperti menghargai, bekerja sama, saling membantu, dan lain-lain, bersumber dari nilai kemanusiaan.
3. Ketiga, Nilai Persatuan. Jika suatu kegiatan mendorong integritas dan persatuan, maka kegiatan itu dianggap bermanfaat. Sikap yang memecah belah persatuan maupun sikap yang mementingkan diri sendiri dan egois merupakan perbuatan yang buruk. Meskipun seseorang dapat mendasarkan tindakannya pada keyakinan agamanya (sila ke-1), etika Pancasila menyatakan bahwa perilaku tersebut buruk jika merusak persatuan. Nilai-nilai pengorbanan, patriotisme, dan solidaritas semuanya berasal dari asas ini.
4. Keempat, Nilai Kerakyatan. Terdapat nilai yang sangat penting, seperti nilai-nilai kebijaksanaan dan permusyawaratan, terkait dengan nilai kerakayatan. Kebijaksanaan merupakan perbuatan-perbuatan yang bermakna kebaikan yang paling tinggi. Misalnya, penghapusan tujuh kata dari sila pertama Piagam Jakarta menjadi contoh yang sangat baik. Meskipun mayoritas anggota PPKI setuju dengan tujuh istilah tersebut, perspektif minoritas "dimenangkan" atas mayoritas dengan mempertimbangkan kelompok kecil (dari Timur) yang dapat diterima secara realistis dan argumentatif. Oleh karena itu, suatu tindakan itu baik jika dilandasi oleh pertimbangan yang berlandaskan musyawarah, tetapi tidak selamanya baik jika diterima atau bermanfaat bagi banyak orang. Melahirkan cita-cita seperti kesetaraan, menghargai perbedaan, dan lain-lain merupakan nilai kerakyatan.
5. Kelima, Nilai Keadilan. Kata keadilan dipandang dalam kaitannya dengan manusia sebagai individu seperti dalam sila kedua. Nilai keadilan pada sila kelima lebih terfokus pada lingkungan masyarakat. Jika suatu tindakan mematuhi prinsip keadilan bagi sejumlah besar individu, maka tindakan tersebut dianggap baik. Keadilan mengisyaratkan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama. Nilai ini melahirkan tindakan-tindakan yang mewujudkan lingkungan persatuan dan kerja sama kekeluargaan. Hal ini merujuk pada

pengembangan sikap adil terhadap orang lain, menegakkan keseimbangan antara kewajiban dan hak sambil menghormati hak-hak orang lain. Nilai-nilai kepedulian, kesetaraan ekonomi, kemajuan bersama, dan lain-lain semuanya berasal dari nilai keadilan.

Etika

Menurut Hudiarini (2015), etika berhubungan erat dengan kata moral, "Mos" dan bentuk jamaknya, "Mores," yang juga merujuk pada cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan baik (moralitas) dan menjauhi perbuatan jahat, sering kali saling berkaitan erat. Konsep baik dan buruk, lurus dan bengkok, dan benar dan salah semuanya tercakup dalam istilah etika, etika, dan moral. Adanya penyimpangan atau pelanggaran praktik tidak lagi disebabkan oleh keadaan yang tidak dapat dikendalikan (force majeure), tetapi lebih karena semakin tidak tahunya etika yang menjadi pedoman perilaku manusia. Menurut Soeprapti (2013) dalam (Aini & Dewi, 2022), Etika Pancasila bersumber dari asas-asas moral bangsa Indonesia karena sangat mementingkan akhlak yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Dalam hal ini, kesetiaan, ketulusan, kejujuran, dan kasih sayang merupakan nilai-nilai yang paling dijunjung tinggi. Etika ini berasumsi bahwa orang yang bermoral akan bertindak secara moral dan menunjukkan perbuatan baik, yang dibentuk oleh pengalaman hidup dan pendidikannya.

Sebagai etika teleologis, etika Pancasila berfungsi sebagai kerangka acuan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mencapai tujuan dan aspirasi mereka. Hal yang sama berlaku di zaman kita yang sudah semakin canggih ini. Pendalaman pengetahuan tentang sistem nilai Pancasila sangat penting untuk mencapai semua tujuan dan nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan, memastikan bahwa tidak ada tindakan yang menyimpang dari ideologi negara. Etika Pancasila sebagai etika deontologi, berfungsi sebagai pedoman untuk menumbuhkan kesadaran dan penerapan Pancasila bagi generasi bangsa, khususnya generasi muda Indonesia, dalam rangka mempersiapkan mereka menghadapi masa depan. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan budaya masa kini dan mencocokkan norma sosial budaya dengan karakter bangsa merupakan persiapan bagi generasi penerus yang perlu diperkuat. Sebab, setiap anggota masyarakat akan dibentuk oleh kurun waktu untuk menjadi pribadi yang lebih maju pada masanya. Oleh karena itu, untuk menciptakan manusia yang lebih baik dan lebih adaptif, keterampilan generasi muda harus terus ditingkatkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode survei kuantitatif dengan cara memberikan seperangkat pernyataan kepada responden untuk dijawab secara online melalui google form. Responden terdiri dari 70 mahasiswa Universitas Negeri Medan. Kuesioner terdiri dari 10 pertanyaan yang mencakup berbagai aspek pemahaman Pancasila dan hubungannya dengan isu korupsi. Responden diminta untuk memberikan tingkat persetujuan mereka terhadap setiap pernyataan. Penelitian ini merupakan penelitian deksriptif dikarenakan hasil penelitian ini hanyalah mengidentifikasi dan mendeksripsikan kecenderungan- kecenderungan pendapat Mahasiswa tentang pemahaman dan pelaksanaan nilai- nilai pancasila sebagai Sistem Etika.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil survei menunjukkan tingkat pemahaman dan persetujuan yang tinggi terhadap peran Pancasila sebagai sistem etika dan relevansinya dengan isu korupsi. Berikut penjelasannya:

Tabel 1. Hasil Kuesioner

No	Pernyataan	Persentase jawaban		
		Setuju	Cukup Setuju	Tidak Setuju

1	Apakah anda setuju bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan?	98,8%		
2	Menurut anda, apakah etika Pancasila bertentangan dengan praktik korupsi?	80%	14.3%	
3	Apakah anda percaya bahwa nilai-nilai Pancasila dapat membantu menciptakan pemerintah yang bersih dan berintegritas?	75.7%	24,3%	
4	Apakah anda setuju bahwa korupsi merugikan negara dan terbatasnya fasilitas memadai untuk masyarakat?	88.4%	10,1%	
5	Apajah anda cukup setuju bahwa tindakan korupsi menyalahgunakan uang dan kepercayaan publlik untuk kepentingan pribadi atau orang lain?	71,4%	24.3%	
6	Menurut anda, apakah korupsi bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dalam Pancasila?	90%		
7	Apakah anda setuju bahwa bela negara berarti melawan tindakan korupsi yang merugikan bangsa?	78.6%	18,6%	
8	Apakah anda cukup setuju bahwa kasus korupsi pada masa pandemi meracuni pikiran dan hati nurani jutaan kaum muda serta rakyat Indonesia?	78,3%	21,7%	
9	Apakah anda setuju bahwa bantuan sosial pada masa pandemi adalah bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat?	68,6%	31,4%	
10	Menurut anda apakah Pancasila dapat membantu mencegah perilaku korupsi di Indonesia?	65,7%	32,9%	

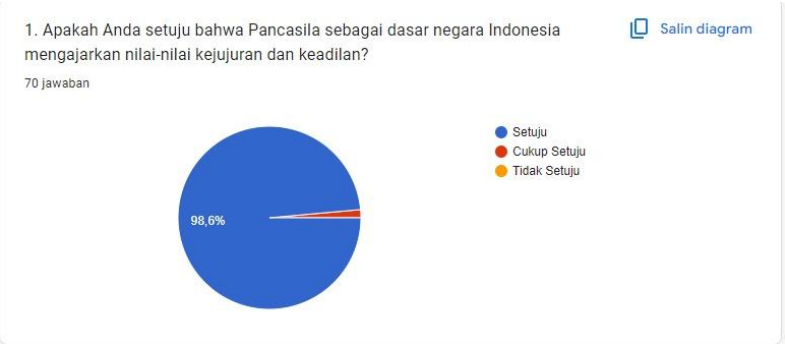

Gambar 1.

Pada gambar 1, hampir seluruh responden (98%) meyakini bahwa Pancasila mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Tingginya tingkat persetujuan ini menunjukkan bahwa generasi muda masih memiliki keyakinan kuat terhadap Pancasila sebagai sumber nilai-nilai moral yang positif. Hal ini mengindikasikan bahwa Pancasila masih dianggap relevan dan penting dalam konteks kehidupan bernegara modern. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Latif (2018) yang menegaskan bahwa "Pancasila sebagai falsafah negara mengandung nilai-nilai etis yang menjadi pedoman moral bagi penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia"

Gambar 2.

Pada gambar 2 mayoritas besar responden (94,3%) melihat adanya pertentangan antara etika Pancasila dan praktik korupsi. Ini menunjukkan pemahaman yang kuat bahwa korupsi bertentangan dengan nilai-nilai fundamental bangsa Indonesia.

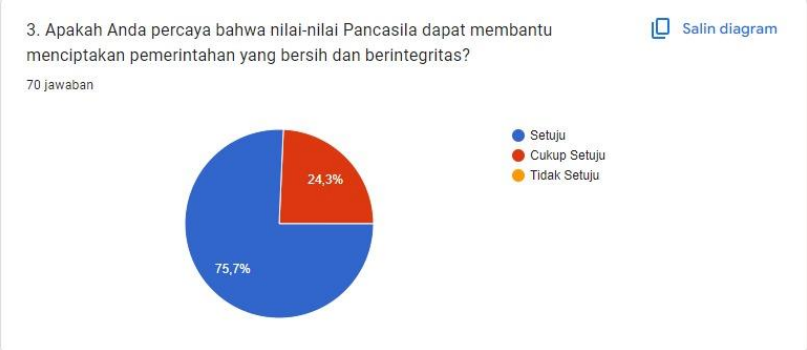

Gambar 3.

Pada gambar 3, 99,3% (75,5% setuju dan 24,3% cukup setuju) responden percaya bahwa nilai-nilai Pancasila dapat membantu menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Terlihat keyakinan yang kuat bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila bisa menjadi solusi untuk masalah korupsi dan tata kelola pemerintahan yang buruk. Ini menunjukkan harapan masyarakat terhadap peran Pancasila dalam reformasi pemerintahan.

Gambar 4.

Pada gambar 4, hampir seluruh responden menyadari dampak negatif korupsi terhadap negara dan masyarakat, termasuk terbatasnya fasilitas publik dan penyalahgunaan kepercayaan publik. Terlihat bahwa masyarakat memahami dengan baik konsekuensi korupsi terhadap kesejahteraan umum. Ini menunjukkan urgensi untuk mengatasi masalah korupsi dalam persepsi publik.

Gambar 5.

Pada gambar 5, 71,4% responden setuju dan 24,3% cukup setuju bahwa tindakan korupsi menyalahgunakan uang dan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Dengan total 95,7% responden yang setuju menunjukkan pemahaman yang baik tentang

definisi dan sifat korupsi. Ini mengindikasikan kesadaran publik yang tinggi tentang pelanggaran etika dalam tindakan korupsi.

Gambar 6.

Pada gambar 6, 90% responden setuju dan sisanya cukup setuju bahwa korupsi bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dalam Pancasila. Konsensus yang hampir bulat ini menunjukkan bahwa masyarakat melihat korupsi sebagai pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila. Ini memperkuat gagasan bahwa memerangi korupsi adalah bagian dari menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

Gambar 7.

Pada gambar 7, 78,6% responden setuju dan 18,6% cukup setuju bahwa bela negara juga berarti melawan tindakan korupsi yang merugikan. Dengan total 97,2% responden yang setuju, terlihat bahwa masyarakat menganggap perlawanan terhadap korupsi sebagai bagian integral dari konsep bela negara. Ini menunjukkan pergeseran pemahaman bela negara dari konsep tradisional ke konteks yang lebih luas, termasuk pemberantasan korupsi.

Gambar 8.

Pada gambar 8, 78,3% responden setuju dan 21,7% cukup setuju bahwa kasus korupsi pada masa pandemi meracuni pikiran dan hati nurani jutaan kaum muda serta rakyat Indonesia. Anak-anak yang tumbuh dengan kepribadian antisosial dalam masyarakat di mana korupsi sudah menjadi hal biasa, nantinya bisa tumbuh dengan pandangan bahwa

ketidakjujuran adalah hal yang normal (bahkan budaya), yang akan menyebabkan mereka terbiasa bersikap tidak jujur dan ceroboh (Pahlevi, 2022). Respon ini menunjukkan keprihatinan mendalam masyarakat terhadap dampak moral dari korupsi, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi. Ini mengindikasikan potensi erosi kepercayaan publik dan dampak jangka panjang pada generasi muda.

Gambar 9.

Pada gambar 9, 68,6% responden setuju dan 31,4% cukup setuju bahwa bantuan sosial pada masa pandemi adalah bentuk tanggung jawab pemerintahan kepada masyarakat. Meskipun mayoritas setuju, persentase yang lebih rendah dibandingkan pertanyaan lain mungkin menunjukkan adanya keraguan tentang efektivitas atau implementasi program bantuan sosial. Ini bisa menjadi indikasi perlunya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam program-program pemerintah.

Gambar 10.

Pada gambar 10, 65,7% responden setuju dan 32,9% cukup setuju bahwa Pancasila dapat membantu mencegah perilaku korupsi di Indonesia. Meskipun mayoritas optimis tentang peran Pancasila dalam pencegahan korupsi, persentase yang lebih rendah dibandingkan pertanyaan lain mungkin menunjukkan adanya kesadaran bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik anti-korupsi masih perlu ditingkatkan.

KESIMPULAN

Studi ini mengungkapkan pemahaman yang kuat dan positif di kalangan mahasiswa Universitas Negeri Medan tentang peran Pancasila sebagai sistem etika dan relevansinya dengan isu korupsi. Mayoritas besar responden melihat hubungan yang erat antara nilai-nilai Pancasila dan upaya pemberantasan korupsi, serta meyakini potensi Pancasila dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan Pancasila di tingkat perguruan tinggi telah berhasil menanamkan pemahaman yang baik tentang nilai-nilai etika dan anti-korupsi. Namun, tantangan yang tersisa adalah bagaimana mengubah pemahaman ini menjadi tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari dan masa depan profesional mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

Aini, N. Q., & Dewi, D. A. (2022). Sistem Etika Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. 6, 11120–11125.

Hudiarini, S. (2015). Penyertaan Etika Bagi Masyarakat Akademik Di Kalangan Dunia Pendidikan Tinggi. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 1(April), 1–13.

Latif, Y. (2018). The Religiosity, Nationality, and Sociality of Pancasila: Toward Pancasila through Soekarno's Way. Studia Islamika, 25(2), 207-245.

Nugraheni, S. D., Angel, V., Puspita, V. H., Santi, W. N., & Fitriono, R. A. (2023). Pancasila as an Ethical System. JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health, 1(2), 196–200. https://doi.org/10.57235/jetish.v1i2.126

Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen. El-Dusturie, 1(1). https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097

Prambudi, Y. D., & Najicha, F. U. (2023). Implementasi Nilai Nilai Pancasila Dan Implikasinya Terhadap Mahasiswa Sebagai "Agent of Change." Jurnal Rontal Keilmuan, 4(2), 1–10.

Utami, S. G. A., & Najicha, F. U. (2022). Kontribusi Mahasiswa Sebagai Agent of Change Dalam Penerapan Nilai-Nilai Pancasila pada Kehidupan Bermasyarakat. De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2(3), 96–101. https://doi.org/10.56393/decive.v2i3.591